



Banyak yang tidak merdeka setelah merdeka: maraknya politik melepas anak kandung untuk meringankan beban ekonomi di Pasuruan Jawa Timur 1960-an.

Ana Ayu Ning Tias

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang 65145, anaaynto09@gmail.com.

Abstract

In fact, independence that was proclaimed in 1945 did not have much impact on remote communities in East Java, many parents with many children and had economic limitations then voluntarily gave their children to people with better economic abilities to be adopted as their children. Research on this problem uses the interview method, as well as archives that state the population in East Java. This research is aimed at uncovering the other side of the euphoria of this nation's independence.

Keywords

Independence, Prosperity, Keluarga Berencana

Abstrak

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 1945 nyatanya tidak memberikan dampak banyak bagi masyarakat pelosok di Jawa Timur, banyak orang tua dengan banyak anak dan memiliki keterbatasan ekonomi kemudian memberikan anak mereka secara sukarela kepada orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk diangkat menjadi anak mereka. Penelitian tentang masalah ini menggunakan metode wawancara, juga arsip yang menyatakan jumlah penduduk di Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk menguak sisi lain dari uforia kemerdekaan bangsa ini.

Kata kunci

Merdeka, Kesejahteraan, Keluarga Berencana

Pendahuluan

Menurut Jonathan Haughton dan Shahidur R Khaner Ketimpangan merupakan salah satu dari bentuk ketidakmerataan pembangunan oleh pemerintah. Bentuk ketimpangan sangat sering dijumpai baik dinegara maju maupun negara berkembang, meski ketimpangan yang dimaksud memiliki deskripsi dan definisi berbeda, namun kasus ketimpangan hampir selalu ditemui diberbagai wilayah. Bentuk-bentuk ketimpangan nyata menjadi salah satu bagian dari peradaban.

Bagi negara-negara berkembang, kasus dan fenomena ketimpangan sosial dan ekonomi ditemui hampir diseluruh sudut kota. Bentuk fenomena ini menjadi indikator yang juga menentukan berhasil atau tidaknya sebuah negara mengatasi kesejahteraan masyarakatnya. Terutama bagi negara berkembang negara yang baru saja merdeka juga

memiliki permasalahan serupa bahkan lebih rumit soal kesejahteraan. Keruwetan politik dan lain hal menjadikan proses meningkatnya kesejahteraan berjalan lambat.

Masyarakat sebagai anggota dari sebuah negara merupakan pihak yang paling banyak menerima dampak sosial, dan juga ekonomi. Permasalahan ekonomi dan sosial yang dianggap tidak dapat ditangani pemerintah kemudian membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan dengan cara mereka sendiri. Masyarakat penghuni kasta menengah kebawah menjadi kaum paling dirugikan dalam besarnya jarak yang diciptakan dalam ketimpangan sosial dan ekonomi.

Masalah ekonomi yang melanda negara yang baru saja merdeka diantaranya disebabkan inflasi, banyaknya mata uang yang beredar, blockade ekonomi, kas negara yang kosong dan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan penjajah dalam (Keadaan Sosial Ekonomi Pasca Kemerdekaan, Zulkarnain dan Annisa Onifah dalam staffnew.uny.ac.id). bagi Indonesia yang baru saja memproklamkan kemerdekaannya tentu saja masalah dari berbagai sektor menjadi tantangan yang harus sesegera mungkin dicarikan solusinya. Masalah dan tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkannya partisipasi pemuda dalam pembangunan, masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, serta masih banyaknya permasalahan sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam, dan gejala disintegrasi sosial. (BAB I Bappenas Kesejahteraan Masyarakat. dalam bappenas.go.id).

Dalam tulisan ini mencoba memunculkan dan mengkaji tentang bagaimana keadaan sosial dan ekonomi di Pasuruan yang berhubungan dengan maraknya politik melepas anak kandung untuk meringankan beban ekonomi pada 1960-an. Bagaimana sisa-sisa dari politik ini masih ada dalam cerita oral milik mereka yang sebelumnya pernah merasakan proses tersebut secara langsung. Kota Pasuruan menjadi pilihan dalam kegiatan ini karena penemuan kasus ini baru saya pelajari di kota asal saya, beberapa sumber saya dapatkan secara langsung berdasarkan penuturan pribadi. Hal itu memungkinkan saya mendapat lebih banyak keterangan yang berdasar fakta atas hal yang terjadi pada saksi.

Beberapa dari kisah-kisah oral tersebut mengatakan bahwa mereka berasal dari pulau Jawa terutama Jawa Timur, namun terdapat pula sumber yang mengisahkan dia sempat dibawa ke Jawa Barat sebelum akhirnya kembali ke Jawa timur. Yang menarik dari keadaan ini adalah bagaimana peran orang tua kandung juga turut berperan menjadikan perpindahan hak asuh anak pada orang lain. Dalam sebuah kutipan yang menyatakan Hampir semua peristiwa yang terjadi di Indonesia ini adalah terjadi di pedesaan (Kuntowijoyo, 1994:63) menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa sosial baik kecil maupun besar tidak dapat dilepaskan dari wilayah pedesaan, fakta tersebut nyata ditemukan dalam praktik melepaskan anak kandung kepada orang lain di wilayah Pasuruan terutama di desa-desa kecil dimana masyarakatnya didominasi kaum miskin.

Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang (Joeniarto, 1996: 4). Bagaimana politik, ekonomi, sosial dan budaya menjadi sepenuhnya dipegang oleh rakyat Indonesia sendiri, kegoyahan berbagai sistem karena banyaknya tekanan dan problematika juga turut menggenapkan berbagai tantangan dalamuforia kemerdekaan. Dalam masa-masa awal

setelah pengumuman kemerdekaan, para petinggi berusaha mendirikan negara ini diatas kaki sendiri, meski proses itu tidak berjalan dengan lancar namun pemerintah berusaha meletakkan berbagai keadaan pada kondisi terbaik. Kesejahteraan merupakan topik utama yang diharapkan menjadi salah satu hasil dari proklamasi, namun nyatanya topik ini hanya menjadi mimpi belaka, bagi orang-orang dengan perekonomian yang sebelumnya memang buruk, proklamasi tidak menjanjikan apapun, kesejahteraan yang semula diharapkan akan datang seiring uforia proklamasi tidak datang sesuai harapan.

Bagi masyarakat pedesaan terutama, kesejahteraan yang sedang diusahakan menyentuh semua kalangan tentu saja harus melewati perjalanan yang panjang. Masyarakat miskin yang tidak memiliki modal berusaha memenuhi kebutuhan mereka sekuat tenaga, belum dikenalnya program KB menjadikan banyaknya jumlah anggota keluarga pada masa itu. Beban banyaknya anggota keluarga yang tidak dalam usia produktif memaksa banyak keluarga miskin menggunakan metode ikat pinggang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, bagi kepala keluarga beban ini nyata dibebankan pada pundaknya, sebagai pemimpin tentu saja ia berusaha membuat seluruh anggota keluarganya dalam keadaan tercukupi, namun fakta di lapangan tidak mendukung itu.

Ekonomi merupakan suatu bagian hidup manusia yang paling krusial. Urusan kesejahteraan manusia dalam kehidupannya bergantung pada kebutuhan ekonominya. Hal ini tak terbantahkan oleh apapun termasuk politik dan sosial bahwa kesejahteraan adalah hal yang utama. Manusia dalam menjalankan kehidupan ekonominya tidak terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* sehingga dalam kondisi ini, saling tabrak antar kepentingan sangat mungkin terjadi. Kondisi seperti ini membuat hukum sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, mutlak dibutuhkan (Nunung Nuryartono dan Hendri Saparini, 2009).

Keadaan ekonomi yang buruk banyak mendorong terjadinya masalah kesehatan seperti busung lapar dan gizi buruk, karena tidak mampunya kepala keluarga dalam mencukupi kebuhan primer anggota keluarga, mereka kemudian mencari alternatif penyelesaian lain diantaranya memberikan anak mereka pada orang lain. Kasus ini menjadi salah satu hal yang dianggap solusi bagi kalangan msikin, apalagi dengan jumlah anak yang banyak para orang tua menjadi mau tidak mau menyukarelakan anggota keluarganya menjadi anggota keluarga orang lain. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa orang tentu berat melepaskan anak mereka.

Dalam artikel *Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009)* Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan, laju pertumbuhan jumlah penduduk pasca kemerdekaan sangat tinggi (Hakim,2012) . Jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, meningkat menjadi 85,4 juta jiwa pada tahun 1955, dan 97,02 juta jiwa (sensus penduduk tahun 1961). Dalam masyarakat produksi pangan tetap digalakkan namun tetap saja tidak seimbang dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dijelaskan bahwa setelah kemerdekaan pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami kenaikan, meski dibarengi pula dengan kenaikan produksi pangan, ledakan ponduduk yang

spontan dengan kurangnya solusi tetap menjadikan tingginya angka kemiskinan akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan primer. Juga adanya anggapan banyak anak banyak rezeki menjadikan rakyat miskin dan juga tidak berpendidikan beranggapan bahwa jika mereka punya banyak anak ekonomi mereka akan serta merta menjadi baik, padahal pada faktanya banyak anak tidak hanya soal melahirkan namun juga bagaimana membesarkan anak dengan baik serta mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Berbagai kebijakan ekonomi terus dilakukan pemerintah guna meningkatkan perekonomian negara yang akan berdampak bagi masyarakatnya, namun bahkan setelah berbagai kebijakan dilakukan disertai dengan pergantian kabinet nyatanya tidak memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam artikel tersebut juga disebutkan meski tidak sepenuhnya merosot, namun telah dianggap gagal mengimbangi pertumbuhan penduduk. Pendidikan saat ini dianggap sebagai indikator keberhasilan suatu bangsa menghadapi problematika, namun setelah peristiwa kemerdekaan perbaikan pendidikan juga merupakan hal yang sulit dilakukan. Focus yang terbagi-bagi menjadikan sesuatu dilakukan dengan tidak seutuhnya sehingga hasil yang diharapkan pun tidak terjadi.

Pada awal kemerdekaan, pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air (Tim Uny: 76). Setelah peristiwa proklamasi focus didikan yang diberikan pemerintah hanya nasionalisme dan cinta tanah air, fokus ini ditujukan untuk memperkuat pondasi negara yang baru saja berdiri. Sehingga fokus lain terbengkalai, dampaknya tidak semua yang menempuh pendidikan mengerti akan pentingnya kesehatan dan juga mengetahui dan memahami bahwa jumlah anak banyak tidak menentukan kemakmuran jika tidak dibarengi dengan kemampuan finansial yang baik. Sedangkan dalam artikel lain milik M. Dawam Raharjdo berjudul Menuju sistem perekonomian Indonesia dijelaskan bahwa di Indonesia berlaku sistem Ekonomi Terpimpin yang berdampingan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin juga turut menjadi problematika kesulitan bagi pihak-pihak pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka, hal ini kembali lagi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Masyarakat marjinal kebanyakan berusaha mempercayai kinerja pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian setelah kemerdekaan, namun banyaknya fokus yang terbagi dan ideologi ekonomi terpusat tentu membuat banyak permasalahan muncul lebih banyak. Kesulitan-kesulitan berusaha diselesaikan dengan cara yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemajuan ekonomi kemudian dilakukan. Meski tidak terdapat sumber tertulis yang menyatakan bahwa praktek melepas anak kandung marak pada 1960an namun minimnya tingkat sejahtera dan tingginya angka kemiskinan merekam jejak tersebut dengan baik. Rekam jejak dari masalah tersebut menyimpulkan sisi lain dariuforia kemerdekaan di pelosok-pelosok negeri.

Artikel-artikel diatas tersebut sebagian besar hanya menjelaskan bagaimana kondisi kesejahteraan, ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia setelah merdeka secara garis besar, bahkan hampir tidak ada yang membahas tentang politik melepas anak kandung sebagai alternatif meringankan beban ekonomi. Namun dalam tulisan ini penulis lebih menguak sisi

sosial dari politik melepas anak kandung demi memperbaiki taraf ekonomi yang sempat marak dilakukan masyarakat miskin pedesaan pelosok Jawa Timur pada 1960-an.

Metode

Artikel ini disusun berdasarkan prosedur yang berlaku dalam penulisan sejarah diantaranya dengan heuristik yakni pengumpulan sumber dari berbagai segi seperti jurnal serta artikel online tentang kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia setelah merdeka, juga keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menggunakan metode wawancara kepada saksi sejarah yang relevan seperti orang yang memberikan anak mereka serta beberapa orang yang pernah menjadi korban politik ini pada masa tersebut.

Setelah itu penulis melakukan kritik sumber untuk menetapkan sumber-sumber yang otentik dan kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, lalu dilanjutkan dengan interpretasi atau pengertian dan pemahaman dari sumber yang telah diperoleh sehingga mendapat informasi yang tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan penulis. Setelah melewati berbagai proses penelitian dan mendapat informasi serta keterangan yang dibutuhkan penulis melakukan langkah terakhir yakni menulis hasil penelitian. Guna mengungkap fakta dan sisi lain dariuforia kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Hasil dan Pembahasan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia adalah titik kulminasi yang menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan maka keesokan harinya, sabtu tanggal 18 Agustus 1945 bersidanglah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Gedung Tyuuoo Sangi-In untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar (Simorangkir, 1984).

Proklamasi kemerdekaan adalah godam pelecut bagi rakyat Nusantara sebagai tanda mulainya kehidupan baru yang lebih baik. Jatuhnya pemerintahan kepada tangan rakyat Indonesia kemudian membuat banyak harapan bagi rakyat kecil yang sengsara secara mental dan finansial. Proklamasi dianggap sebagai salah satu gerbang menuju kehidupan yang berisi kesejahteraan. Bagi rakyat miskin tentu saja hal ini sangat diharapkan mampu menaikkan taraf hidup mereka, bangsa yang semula dikelola bangsa asing kini telah dimiliki warga asli Indonesia. Rakyat kecil mungkin tidak turut terdengar gegap gempita seperti warga metropolitan, namun dalam dada mereka gemuruh semangat itu sama dengan hentakan warga lainnya.

Keadaan politik yang masih kacau balau, berpengaruh terhadap keadaan sosial dan ekonomi rakyat, usaha memperbaiki perekonomian nyatanya tidak sampai di pelosok-pelosok negeri. Keadaan ekonomi yang semula diharapkan rakyat nyatanya tidak sesuai dengan impian. Selama diajajah bangsa Indonesia mengalami banyak kesulitan mental

seperti kebijakan yang menyengsarakan dan juga kesulitan finansial seperti kurangnya makanan pokok sebagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini menimbulkan tekanan bagi kalangan miskin, mereka berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai cara, bagi rakyat miskin yang tidak memiliki lahan mereka kebanyakan menjadi buruh dari lahan pertanian dan perkebunan milik orang kaya.

Anak Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak-anak juga merupakan buah cinta orang tua. yang wajib dirawat dengan sepenuh hati, namun bagaimana jika orang tua justru tidak mampu merawat sang anak dengan baik, bagaimana nasib sang anak dan bagaimana kemudian kewajiban orang tua. Setiap orang tua tentu mengharapkan kehidupan yang baik bagi anak, dengan cara apapun orang tua selalu berusaha memenuhi dan merawat anak-anaknya dengan baik. Sebagai kewajiban orang tua hal tersebut tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Bagi orang tua yang tidak mampu kemudian berusaha sekuat tenaga tetap merawat sang anak, namun beberapa mengambil pilihan memberikan anak kandung mereka kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal yang diketahui memiliki tingkat sejahtera lebih baik dari dirinya untuk dipercaya merawat anaknya.

Pasuruan merupakan salah satu nama tempat di Jawa Timur bagian timur, pada masa penjajahan Belanda Pasuruan telah eksis karena memiliki pelabuhan yang digunakan sebagai tempat transit bagi kapal-kapal dagang milik Belanda, selain itu juga terdapat beberapa peninggalan lain yang membuktikan bahwa Pasuruan telah dikenal lama bahkan semenjak berdirinya negara Indonesia. Eksistensi Pasuruan sebagai sebuah kota yang cukup dikenal semenjak masa penjajahan nyatanya menyisakan sisi-sisi lain. Pertumbuhan penduduk tentu sangat mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa, jika bangsa tersebut memiliki jumlah penduduk banyak dan kelahiran tinggi namun tidak disertai dengan kemampuan stabilitas ekonomi yang baik tentu saja hal itu akan berpengaruh pada kemakmuran suatu bangsa yang akan berdampak bagi rakyatnya. Di bawah ini adalah jumlah penduduk yang menjelaskan tingginya pertumbuhan penduduk dari antara tahun 1960-1970.

Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Indonesia dan Bali 1971 - 2014

Tahun	Indonesia		Bali	
	Pertumbuhan	Jml Penduduk	Pertumbuhan	Jml Penduduk
1930-1961	2,15	97.232.132	-	1.783.000
1960-1970	2,35	119.254.241	1,75	2.120.000
1971-1980	2,32	147.490.298	1,54	2.469.930
1980-1990	1,18	179.378.946	1,18	2.777.811
1990-2000	1,31	206.264.595	1,26	3.151.162
2000-2010	1,49	237.641.326	2,15	3.890.757
2010-2014	1,37	252.000.000	1,92	4.105.232

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan dan Penduduk Indonesia-Bali 1971-2015

(sumber: Badan Pusat Statistik 2015)

Sedangkan dalam rekaman statistic data nasional Badan Pusat Statistik (bps.go.id) terdapat rekam jejak yang memperlihatkan jumlah penduduk Jawa Timur pada 1970an yang berarti berjarak 10 tahun dari 1960.

Provinsi	Penduduk					
	1971	1980	1990	1995	2000	2010
Jawa Timur	25 516 999	29 188 852	32 503 991	33 844 002	34 783 640	37 476 757

Gambar 2. Perkembangan Penduduk Jawa Timur 1971-2010
(sumber: bps.go.id)

Dalam rekam data yang tertera jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan pertumbuhan dalam kurun waktu tertera, peningkatan pertumbuhan dari 1960-1970 mencapai 2,35. Sedangkan di Jawa Timur jumlah penduduk pada 1971 mencapai 25.516.999 jiwa, jumlah ini tentu merupakan jumlah yang cukup besar dalam sebuah provinsi. Jumlah penduduk Indonesia dan Jawa Timur yang terus mengalami peningkatan padahal negara baru seumur jagung tentu sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mengucurkan dana lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menengah kebawah. Dalam catatan BBC dijelaskan bahwa sensus setelah proklamasi dilakukan pada 1961, namun sayangnya tidak ada catatan resmi jumlah penduduk sehingga kepastian dari data-data yang ada tidak akurat. Namun dalam catatan sejarah 1960 merupakan masa ledakan kelahiran yang besar, bagaimana tidak jumlah pertumbuhan pada 1960 merupakan jumlah pertumbuhan paling tinggi hingga 2014.

Menurut Muslikah (45 tahun) pada 1980an di desanya jumlah anak-anak sangat banyak, sedangkan keadaan ekonomi dari kebanyakan mereka berada di ambang kemiskinan, mereka kadang hanya makan sekali dalam sehari itupun bukan menu yang istimewa kadang mereka hanya mengonsumsi nasi dengan garam. Kesulitan ekonomi para orang tua miskin menyebabkan banyak masalah kesehatan pada anak dan juga masalah lain seperti anak-anak tidak mendapat pendidikan yang seharusnya.

Keterangan tersebut sedikit banyak menjelaskan bagaimana keadaan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan terutama mereka yang memiliki jumlah anak banyak. Keadaan ekonomi yang sulit kemudian turut menyulitkan kesejahteraan mereka. Kemiskinan di desa-desa biasanya merupakan kemiskinan turun temurun sehingga untuk mengangkat perekonomian keluarga menjadi sangat sulit. Dalam rekam sejarah kesejahteraan merupakan problematika dalam setiap era, berbagai era selalu memiliki masalah dengan angka kemiskinan. Bagi Indonesia gaung kemerdekaan nyatanya menyisakan banyak problematika bagi masyarakat terutama mereka dengan ekonomi menengah kebawah, praktik melepas anak kandung kemudian juga menjadi solusi pilihan bagi orang tua miskin dengan jumlah anak yang banyak.

Muslikah sendiri merupakan saksi hidup dari praktik melepas anak kandung yang marak terjadi setelah merdeka, pada sekitar 1978 Muslikah pernah diberikan kepada orang Jawa Tengah, Muslikah datang ke Jawa Tengah setelah dibawa oleh salah satu saudaranya yang bekerja sebagai pembantu di rumah orang tersebut, Muslikah lupa dimana tepat kota ia dibawa namun ia ingat bagaimana ia diperlakukan, Muslikah diperlakukan sebagaimana anak kandung, ia dibelikan gaun-gaun dan diberi makan dengan

menu yang sama dengan anggota keluarga lain, dalam keluarga tersebut orang yang mengangkat Muslikah sebagai anak juga memiliki anak perempuan.

Muslikah juga duduk bersama di meja makan dengan sang tuan rumah, bahkan saudara Muslikah juga turut melayani Muslikah sebagaimana anggota keluarganya yang lain. Setelah sekitar 2 bulan Muslikah meminta pulang karena merasa rindu dengan emaknya. Akhirnya saudaranya mengantarkannya pulang dan Muslikah tidak pernah kembali lagi ke Jawa Tengah. Muslikah bersaksi bahwa ia lebih nyaman berada dirumah emaknya meski setiap hari makannya hanya nasi jagung dengan garam. Muslikah merupakan satu-satunya saksi hidup yang pulang dan kembali kepangkuan orang tuanya dari banyaknya sumber yang penulis kumpulkan. Muslikah mengatakan bahwa setelah proses adopsi yang gagal tersebut dia sempat ikut dengan orang lain namun masih didaerah Pasuruan pula. Muslikah ikut dengan seorang keluarga Tentara, istrinya bernama Ibu Ami. Muslikah tidak sendiri ia ikut Ibu Ami bersama kakak laki-lakinya. Keluarga tentara ini merupakan salah satu dari majikan tetangga Muslikah.

Disana Muslikah dan Misro kakaknya ikut membantu banyak kegiatan keluarga tersebut, dari subuh hingga petang, Muslikah membantu Ibu Ami berdagang karena Ibu Ami memiliki toko kelontong, disinilah Muslikah pernah disekolahkan hingga kelas tiga SD setelah itu Muslikah dan Misro kembali kerumah orang tua kandungnya dan tidak pernah kembali. Namun hingga saat ini Muslikah mengaku masih menjalin hubungan baik dengan Ibu Ami dan Keluarga. Proses adopsi ini mengakibatkan Muslikah setidaknya dapat menempuh sekolah dasar sehingga ia tidak buta huruf. Meski hanya sampai kelas tiga sekolah dasar Muslikah bersyukur ia masih sempat menempuh pendidikan, setelah kelas tiga SD Muslikah memutuskan untuk pulang kerumah emaknya, ketika berada dirumah Ibu Ami Muslikah masih menyempatkan diri untuk mengunjungi emaknya setiap bulan, Ibu Ami selalu mengantar kunjungan Muslikah kerumah emaknya. Ketika Muslikah memutuskan untuk kembali kerumah emaknya Ibu Ami mengizinkan dengan lapang hati, saat itu Ibu Ami telah memiliki dua anak sehingga ia tidak terlalu merasa berat ketika anak angkatnya memilih kembali kerumah orang tuanya.

Sedikit berbeda dengan Muslikah Ratna (52 Tahun) diberikan kepada orang asing oleh orang tuanya dari Probolinggo ke Pasuruan, menurut Ratna ketika ia berumur sekitar 6 tahun ayahnya memberikan Ratna kepada kerabatnya di Pasuruan, namun kerabat Ratna kemudian memberikan Ratna kepada orang lain, meski begitu Ratna tetap mengetahui dimana asalnya dan juga orang tua kandungnya. Orang tua angkat Ratna menceritakan bahwa ia adalah anak angkat dan darimana ia berasal. Ratna tidak mempunyai pilihan untuk kembali karena di keluarga barunya ia tidak mengenal siapapun untuk mengembalikannya kerumah aslinya, Ratna baru mengetahui asal muasalnya ketika ia dewasa, orang tua angkat Ratna sendiri tidak memiliki anak sehingga mengangkat Ratna sebagai anak. Dalam keluarga tersebut Ratna tidak memiliki saudara angkat lain, ia adalah satu-satunya anak dalam rumah tersebut. Hingga akhir hayatnya Ratna tetap tinggal dirumah dimana ia dibesarkan keluarga angkatnya. (Ratna meninggal pada awal bulan November 2020)

Dari cerita-cerita tersebut sedikit banyak sama dengan cerita Yatimah, Yatimah merupakan wanita kelahiran sekitar 1967-an yang saat ini berusia 53 tahun, Yatimah lahir di Jember sebelum kemudian diberikan kepada seseorang di Pasuruan. Yatimah datang ke keluarga barunya sekitar umur 8 tahun, Yatimah merupakan salah satu saksi hidup yang diberikan pada orang lain ketika usianya sudah cukup besar. Yatimah merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Orang tua angkat Yatimah merupakan salah seorang pelancong

yang sering merantau, orang tua angkat Yatimah pada saat itu tidak memiliki anak sehingga meminta kepada orang tua Yatimah untuk meminta Yatimah sebagai anak angkat mereka, orang tua kandung Yatimah yang saat itu memiliki 6 anak memberikan Yatimah kepada keluarga barunya, keluarga baru Yatimah cukup lama tinggal di darah situ hingga kemudian berani memberikan Yatimah kepada keluarga barunya. Yatimah dibawa ke Pasuruan dan tinggal di Pasuruan hingga saat ini, Yatimah hampir tidak pernah kembali ke Jember karena tidak ingat dimana letak tepat dari kedua orang tuanya. Menurut Yatimah ia sudah lupa dimana ia dulu dilahirkan, ia hanya tau ia dibawa dari Jember oleh orang tua angkatnya. Hingga akhir ayat orang tua angkat Yatimah tidak memiliki anak kandung. Orang tua kandung Yatimah juga tidak banyak berkisah tentang pengangkatan dirinya sebagai anak mereka.

Yatimah tidak memperlmasalahkan meski hingga saat ini ia tidak mengetahui kabar orang tuanya, Yatimah sudah bersyukur ia dirawat dengan sangat baik oleh orang tua angkatnya. Yatimah juga menyadari kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang tuanya menyebabkan ia harus diasuh oleh orang lain. Orang tua yang tidak punya banyak pilihan lebih memilih memberikan anak mereka karena berfikir dengan proses itu mereka dapat lebih meringankan beban ekonomi keluarga, selain itu mereka juga lebih tenang karena anak mereka sedikit banyak akan lebih terjamin dibanding dengan tetap bersama mereka.

Urusan administrasi yang masih tidak ada, tidak menyulitkan proses adopsi ini, setiap orang yang mempunyai hak untuk mengadopsi anak orang lain, bahkan yang mereka tidak ketahui asal usulnya. Anak-anak hasil adopsi juga tumbuh besar di keluarga baru bahkan bisa tanpa mengetahui keluarga kandungnya. Alasan yang paling utama dari adanya proses adopsi ini adalah orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, sehingga menyebabkan mereka mengangkat anak dari orang lain yang memiliki banyak anak namun dengan kondisi ekonomi yang tidak baik.

Dalam kesaksian yang penulis hadirkan mungkin mengisahkan mereka yang diadopsi oleh orang yang tidak memiliki hubungan darah apapun. Namun beberapa yang terjadi dilapangan banyak juga yang diadopsi saudara, saudara dekat maupun saudara jauh. Salah satu kesaksian ini pernah dikisahkan Siti Makhmudah 55 tahun, Siti pernah diadopsi oleh budhanya yang memiliki keadaan ekonomi mapan, saat itu emak kandungnya memiliki 7 anak, setiap hari Siti hidup berkekurangan sehingga ia kemudian diangkat oleh budhanya. Siti masih tetap berhubungan baik dengan emak kandungnya karena rumah emak dan budhanya tidak begitu jauh. Sehingga sekali waktu Siti dapat mengunjunginya. Kisah Siti merupakan kisah yang menyatakan bahwa politik melepas anak kandung juga dilakukan terhadap saudara sendiri.

Hingga saat ini praktik melepas anak mungkin masih ada, dalam wujud adopsi dan diatur oleh undang-undang. Namun tidak semarak tahun-tahun setelah uforia proklamasi, saat ini kondisi ekonomi masyarakat telah lebih baik, meski kasus ketimpangan nyata ada dan memiliki jumlah tidak sedikit namun masyarakat mulai banyak meninggalkan praktik ini, diantaranya karena rumitnya urusan administrasi. Untuk menangani masalah maraknya praktik ini berbagai program dicanangkan pemerintah guna menangani masalah kesejahteraan diantaranya yakni program KB. Masyarakat pada zaman dulu hampir tidak pernah mendapat edukasi tentang usia wanita yang aman untuk mengandung dan tidak, maraknya pernikahan dini akhirnya juga menimbulkan masalah tersebut.

Pada era kepemimpinan Soekarno, terdapat kelompok swadaya masyarakat yang bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Meski demikian, Soekarno menentang isu program KB. PKBI berusaha aktif dalam kegiatan terkait dengan program

KB pada tahun 1957. Melalui PKBI cikal bakal perkembangan program KB dimulai. (Puri Kusuma Dwi Putri, Aida Vitayala Hubeis Sarwititi Sarwoprasodjo, Basita Ginting. 2019)

Ancang-ancang pelaksanaan program KB telah ada semenjak masa Presiden Soekarno. Namun pada masa ini sumber daya manusia masih dalam proses pertumbuhan sehingga pengendalian pertumbuhan manusia dianggap tidak terlalu penting bagi bangsa Indonesia saat itu. Setelah lengserannya Presiden Soekarno, Soeharto kemudian maju dan melanjutkan posisi pemimpin tertinggi negara ini, pada masa inilah program KB mulai dijalankan. Pada masa di era kepemimpinan Presiden Soeharto kesuksesan program KB telah dikenal di dunia (Cammack & Heaton, 2001). Dalam pelaksanaannya Soeharto menggandeng departemen kesehatan, pendidikan dan informasi.

Dalam pelaksanaan di masyarakat presiden Soeharto menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga organisasi kemasyarakatan. Pada saat itu mulai digaungkan slogan dua anak cukup. Perempuan kemudian menjadi target kontrol reproduksi dalam masyarakat dengan penggunaan alat kontrasepsi. Meski terdapat desentralisasi dalam masyarakat, sentralisasi nyatanya masih di dalam kendali penuh presiden Soeharto Penelitian Mohamad (2007) mengemukakan bahwa di era tahun 80-an dicanangkan program KB dengan tujuan demografis untuk membatasi jumlah penduduk. Program “Dua Anak Cukup” disampaikan dengan gencar dan ada unsur “paksaan.”

Meski terdapat unsur paksaan namun program ini kemudian mampu menekan angka pertumbuhan penduduk yang dianggap dapat memberikan dampak baik secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat, pemerintah mendorong terbentuknya keluarga kecil dan harmonis dalam pelaksanaan program ini.

Kesimpulan

Tahun-tahun setelah merdeka merupakan tahun uforia bagi bangsa Indonesia yang telah dijajah selama ratusan tahun. Gaung kemerdekaan yang semula diharapkan mampu memutar arah kesejahteraan sosial dan ekonomi nyatanya tidak terjadi. Keadaan bangsa yang masih kacau balau menjadikan rakyat jauh dari kata sejahtera.

Keadaan ini kemudian memaksa rakyat miskin di Jawa Timur melakukan penyelesaian masalah dengan cara-cara tertentu diantaranya adalah melepaskan anak kandung mereka kepada orang yang memiliki kemampuan ekonomi dan finansial. Politik ini marak terjadi sebagai bentuk solusi dari masyarakat miskin untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Tidak adanya kecakapan administrasi juga menyebabkan maraknya praktik ini dalam masyarakat. Keadaan ini juga disebabkan banyaknya angka kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan manusia sangat tinggi pada 1960-an. Pemerintah kemudian berusaha mengatasi masalah ini dengan melaksanakan program KB pada masa pemerintahan presiden Soeharto, slogan dua anak cukup kemudian marak digaungkan pemerintah pada saat itu. Program ini sedikit banyak telah mengatasi masalah ledakan penduduk yang terjadi, meski dengan kontroversinya program ini mampu mengatur angka kelahiran dalam masyarakat saat itu.

Daftar Rujukan

- Hakim, Abdul. (2012). Perbandingan perekonomian dari masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, Vol.2, No.3, 161-180.
- Kusuma, Putri., Vitayala, Aida, & Sarwoprasodjo, Sarwititi. (2019). Kelembagaan dan capaian program keluarga berencana (KB): dari era sentralisasi ke desentralisasi. *Jurnal Kependuduk Indonesia*, Vol.1, No.14, hlm. 1-12.
- Makhmudah, Siti. (2020). Wawancara
- Muslikah. (2020). Wawancara
- Nuryartono, Nunung & Saparini, Hendri. (2019). Kesenjangan ekonomi sosial dan kemiskinan, ekonomi konstitusi: Haluan baru kebangkitan ekonomi Indonesia. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate.
- Rahardjo, M Dawam. (2019). Menuju sistem perekonomian Indonesia. *UNISIA*, Vol.72, No.22, hlm.113-128.
- Ratna. (2020). Wawancara
- Yatimah. (2020). Wawancara